

## ABSTRAK

**Muhammad Fahmi Nurani**; *Pembayaran Gaji PNS pada Bank Konvensional (Tinjauan Perjanjian Kerjasama No.145 Tahun 2008 tentang Pembayaran Gaji PNS Kementerian Agama pada Bank BRI)* di bawah bimbingan I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi dan bimbingan II : Dr. Hj. GustiMuzainah, SH, MH, pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, (2016).

Kata Kunci: PembayaranGaji, PNS Kementerian Agama, Bank Konvensional, Perjanjiankerjasama.

Bankkonvensionalmerupakanbadanusaha yang menghimpun dana darimasyarakatdalambentuksimpanandanmenyalurkannyakemasyarakatdalambentukpembiyaandanat audalambentuklainnyagunameningkatkanarafhidup orang banyak.Salahsatu bentuk penggunaan bank konvensional adalah pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS),Sedangkanmayoritas PNS adalahberagama Islam, yang tentunyaberhakuntukmelaksanakanajaranagamanyadenganbenarsesuaidengan yang diyakininya.Denganadanyakerjasamadengan bank konvensional yang mengaturdanmengharuskan PNS untukmenerima gaji di Bank konvensional, halinimemaksaseorang PNS untukmenggunakan bank Konvensional, sedangkandalamajaran Islam terdapataturan yang mengharamkanbunga. Hasilakhir yang diinginkanadalahmemberikanhak yang seharusnya dimilikiolehsetiap PNS sebagaiwarganegarauntukmenjalankanajaranagamanya.

Penelitianinimenggunakanpendekatanyuridisnormatif, yang membahasdoktrin-doktrinatauasasdalamilmu hokum. Adapunsifatpenelitianiniadalahdeskriptifanalitisdenganpendekatankualitatifterhadapbahan hukum yang diperoleh.

Hasilpenelitianiniadalahsebagaiberikut: *pertama*, Mekanismepembayarangajiberdasarkanperundang-undanganmasing-masinglebagamenyusunrencanakerjadananggaran, penggunaanggaranmembuat SPM dan KPPN mengeluarkan SP2D kepada bank operasional, denganketentuan bank operasionaldapatpada bank konvensionaldansyariah. *Kedua*, mekanismepembayarangajipadaperjanjiankerjasamadilakukandengankewajibanmembuatrekeningpada bank BRI bagisetiapsatkerdanpegawai yang akandigunakansebagaitempatpembayarangaji. *Ketiga*, perjanjiankerjasamaantaraKemenagdan Bank BRI telahmenyalahiatautidakrelevandenganperaturankementeriankeuangankarenaadanyapaksaane nggunaan bank BRI untukpembayarangajinya, danperjanjiankerjasamaitu juga telahmenyebabkandiskriminasitidaklangsungdanmelanggaraskebebasanberagamapadaundang-undangdasarRepublik Indonesia, dengandemikianmakaperjanjianinidapatdikatakanbatal demi hokum atautidakdapatberlakulagi.